

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Halaman 1 dan 9

BPK Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang

● DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga tingkat rasio utang. Sebab, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan sejak 2015.

Ketua BPK Moermahadi Soerjadjanegara mengatakan, rasio utang pada 2015 mencapai 27,4 persen terhadap PDB. Dua tahun berikutnya, rasio utang meningkat menjadi 28,3 persen pada 2016 dan 29,93 persen pada 2017.

Tahun lalu, rasio utang tercatat turun tipis menjadi 29,81 persen terhadap PDB nasional. "(Rasio utang terhadap PDB) memang masih di bawah ambang batas 60 persen, tapi kita *warning* pemerintah. Hati-hati karena ada peningkatan," kata Moermahadi setelah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).

Moermahadi menjelaskan, peningkatan rasio utang tidak terlepas dari realisasi pembiayaan utang pada periode 2015-2018, yaitu sebesar Rp 380 triliun (2015), Rp 403 triliun (2016), Rp 429 triliun (2017), dan Rp 370 triliun (2018). Adapun sampai 31 Desember 2018, menurut audit BPK, nilai pokok atas utang pemerintah telah menembus Rp 4.466 triliun.

Ia memerinci, nilai pokok utang tersebut terdiri atas utang luar negeri sebesar Rp 2.655 triliun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp 1.811 triliun atau 41 persen. "Jadi, *warning* kita tetap pada utang," ujarnya.

Sementara itu, BPK juga mencatat telah terjadi realisasi dalam pening-

katan belanja subsidi dalam APBN 2017. Moermahadi mengatakan, total belanja subsidi hingga akhir 2018 mencapai Rp 216 triliun. Jumlah tersebut melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp 156 triliun. Realisasi subsidi itu juga naik Rp 50 triliun dibandingkan realisasi pada 2017.

Meningkatnya belanja subsidi disebabkan adanya pembayaran utang subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 25 triliun dan realisasi nilai

minyak mentah Indonesia sebesar 67,5 dolar AS per barel yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 48 dolar AS per barel. Selain itu, kondisi nilai tukar rupiah juga di bawah asumsi pemerintah.

Di sisi lain, kata Moermahadi, terdapat penyediaan bahan bakar minyak dan listrik oleh badan usaha melalui skema subsidi ataupun skema penugasan, yang harga jualnya ditetapkan pemerintah di bawah harga keekonomian. Karena itu, BPK menilai pemerintah dan DPR perlu membahas skema pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat.

Secara keseluruhan, BPK menyatakan pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2018 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP 2018.

Moermahadi menjelaskan, BPK memiliki empat kriteria yang mendasari predikat laporan keuangan pemerintah. Kriteria-kriteria tersebut adalah kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, bukti-bukti kompeten yang cukup, masalah pengendalian internal masing-masing lembaga, serta tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, BPK melakukan audit atas 87 laporan keuangan kementerian dan lembaga negara. "Opini WTP ini diberikan kepada 81 laporan keuangan kementerian lembaga dan satu laporan keuangan keuangan bendahara umum negara," kata Moermahadi.

Sisanya, sebanyak empat ke-

mentarian lembaga negara mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan satu lembaga mendapat opini tidak menyatakan pendapat (TMP). Moermahadi mengatakan, lembaga yang mendapatkan predikat WDP, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan, satu lembaga yang mendapat predikat TMP, yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. "Jumlah lembaga yang mendapat opini WDP dan TMP mengalami penurunan dibanding tahun 2017," kata Moermahadi.

BPK menyampaikan tujuh catatan terkait LKPP 2018 untuk segera ditindaklanjuti. Pertama, pelaporan atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos laporan realisasi anggaran belum ditetapkan sesuai standar akuntansinya.

Kedua, dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian kompensasi atas dampak kebijakan tarif listrik nonsubsidi belum ditetapkan. Ketiga, pencatatan, rekonsiliasi, dan pemantauan evaluasi aset kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) belum memadai.

Selanjutnya, skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) belum didukung standar dan kebijakan akuntansi yang lengkap.

Kelima, BPK juga menemukan bahwa pengalokasian dana

desa tahun 2018 belum andal. Keenam, pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik pada 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai. Sedangkan yang terakhir, yakni adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, PNB, belanja, piutang PNB, aset tetap, dan utang.

Tindak lanjut

Menteri Keuangan Sri Muljani mengapresiasi hasil audit BPK atas LKPP 2018. Sri bersyukur karena LKPP kembali meraih opini WTP. "Status ini bisa kita pertahankan untuk tiga tahun berturut-turut. Saya rasa ini positif," kata Sri, kemarin.

Meski begitu, Sri tak menampik ada beberapa catatan yang perlu segera ditindaklanjuti dari hasil audit BPK. Dari sisi komposisi belanja, kata Sri, ada sepertiga belanja pemerintah dalam bentuk transfer ke daerah yang tidak tercatat di neraca pemerintah. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena laporan keuangan pemerintah daerah belum terkonsolidasi.

Selain itu, Sri akan memperhatikan peringatan BPK terkait rasio utang meskipun rasionya masih jauh di bawah ambang batas. Pada intinya, tegas Sri, pemerintah akan menindaklanjuti beberapa temuan sesuai mekanisme yang ada.

"Kita sangat serius untuk menindaklanjuti temuan. Bukti-bukti, beberapa kementerian dan lembaga yang sebelumnya *disclaimer* juga sudah positif," kata Sri.

■ dedy darmawan nasution ed: satria kartika yudha